

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Rifi Maligi



2025

PT BPR RIFI MALIGI adalah lembaga perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS

BAB I PENJELASAN UMUM**A. Pendahuluan**

Pada tahun 2025 dan kedepannya, BPR Rifi Maligi bertekad untuk terus meningkatkan kerangka tata kelola agar selaras dengan praktik terbaik dalam menjalankan perusahaan dan persyaratan regulasi. Kami berfokus pada penguatan kontrol internal, peningkatan proses manajemen risiko, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan dengan integritas tinggi dan hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan dan masyarakat sekitar.

Komponen penting dari komitmen tata kelola yang dijalankan oleh BPR adalah faktor kepercayaan yang kami masukkan dalam perencanaan strategis dan operasional. Kami menempatkan berkelanjutan sebagai bagian dari inti bisnis kami, memastikan bahwa tindakan kami memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini mencakup penilaian risiko persaingan usaha yang ketat, inisiatif keuangan berkelanjutan dan fokus nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Dalam semua upaya kami, BPR tetap berfokus untuk melayani kepentingan para pemangku kepentingan secara luas dengan melakukan transparansi, praktik bisnis yang beretika dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan dan perlunya adaptasi terhadap tantangan dan peluang dimasa depan, komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang kuat akan tetap terjaga menjadi panduan kami dalam membangun organisasi yang berkelanjutan dan tangguh serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

BPR Rifi Maligi, berkomitmen untuk menegakan standar tertinggi tata kelola perusahaan sebagai bagian dari landasan utama operasional kami. Komitmen ini didorong oleh keyakinan yang kuat bahwa praktik tata kelola yang kokoh adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan membangun budaya transparansi serta akuntabilitas diseluruh organisasi perusahaan.

B. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat peningkatan nilai perusahaan.

C. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola PT BPR RIFI MALIGI**1. Transparency**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dipersandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategis BPR.

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	:	PT BPR RIFI MALIGI
Alamat	:	Gedung Tomang Tol Plaza Ciledug Jl Hos Cokroaminoto No 1, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang - Banten
Nomor Telepon	:	021-7300452
Penjelasan Umum	:	<p>Pelaksanaan tata kelola di PT BPR Rifi Maligi didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap kegiatan usaha dan operasional bank guna memastikan pengelolaan yang sehat, profesional, dan berintegritas.</p> <p>Sepanjang tahun 2025, PT BPR Rifi Maligi telah melaksanakan tata kelola secara efektif yang tercermin dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris secara optimal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. • Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan manajemen risiko yang memadai dalam mendukung pengendalian internal. • Penanganan benturan kepentingan yang dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. • Penyusunan dan penyampaian laporan kepada regulator secara tepat waktu dan akurat. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan

	<p>pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.</p> <p>Selain itu, PT BPR Rifi Maligi juga senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola guna menyesuaikan dengan dinamika usaha dan perkembangan regulasi.</p> <p>Dengan penerapan tata kelola yang baik, PT BPR Rifi Maligi berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat.</p>
<p>Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (self assesment) Tata kelola</p>	<p>: Peringkat 2</p>
<p>Penjelasan Komposit Hasil Penilaian Sendiri (self assesment) Tata Kelola</p>	<p>: Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR</p>

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK*)	
	Nama	Bambang Prajitno
	Jabatan	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1) Menetapkan visi, dan misi BPR	

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Menyusun rencana bisnis BPR (RBB) jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; 3) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS; 4) Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; 5) Berwenang mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 6) Memastikan penerapan tata kelola yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, yang didukung oleh implementasi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; 7) Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi telah mengikutsertakan seluruh karyawan dalam pelatihan dan pendidikan APU PPT, Pelindungan konsumen, dan service excelent. 2) Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan OJK maupun audit internal sebagai perbaikan kinerja secara menyeluruh; 3) Direksi mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA secara efisien dan efektif; 4) Direksi menyusun rencana bisnis yang berfokus kepada penyaluran kredit produktif (UMKM) dan penghentian kredit kepada pensiunan; 5) Direksi akan selalu memperhatikan dan menjaga rasio-rasio keuangan agar tetap sehat; 6) Direksi akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan guna memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan, akurat, dan memiliki integritas yang tinggi, sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang semakin baik;

	<p>7) Direksi akan memperhatikan dan mengevaluasi perihal pelaksanaan transformasi digital sebagai upaya peningkatan layanan jasa berbasis digital termasuk dari segi keamanan data;</p> <p>8) Direksi akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap rencana implementasi <i>mobile application</i>, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal.</p> <p>9) Direksi akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta memastikan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap potensi risiko yang timbul dari kerjasama dapat terkendali.</p> <p>10) Direksi akan mengevaluasi atas usulan pembagian bonus untuk kinerja tahun 2025;</p> <p>11) Pemberian imbal jasa kepada Bpk Kimnadi sebagai bentuk apresiasi selama menjabat menjadi Direktur Utama BPR Rifi Maligi.</p> <p>12) Menggunakan jasa KAP Yohan H. Wibowo untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	NIK*)		
	Nama	Ricky Lukman	
	Jabatan	Komisaris Utama	
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
		<p>1) Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS</p> <p>2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib memberikan arahan, melakukan pemantauan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan, penerapan manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR yang dilaksanakan oleh Direksi.</p> <p>3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak</p>	

	<p>meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>4) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan</p> <p>b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR.</p> <p>5) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:</p> <p>a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, maupun auditor ekstern;</p> <p>b. Hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</p>	
2	NIK*)	
	Nama	Ryan Prasetyo
	Jabatan	Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Membantu Komisaris Utama untuk:</p> <p>1) Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS</p> <p>2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib memberikan arahan, melakukan pemantauan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan, penerapan manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR yang dilaksanakan oleh Direksi.</p> <p>3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>b) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p>	

	<p>4) Turut melakukan pengawasan terhadap:</p> <p>a) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan</p> <p>b) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR.</p> <p>5) Turut melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:</p> <p>a) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern;</p> <p>b) Hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	
	<p>1) Meningkatkan kualitas kerja seluruh karyawan, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>2) Menindaklanjuti temuan dari audit intern dan/atau pemeriksaan OJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan waktu yang telah disepakati.</p> <p>3) Melakukan percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA</p> <p>4) Strategi diversifikasi kredit dengan optimalisasi penyaluran kredit UMKM dengan analisis risiko yang lebih mendalam</p> <p>5) Rasio-rasio keuangan BPR perlu dijaga dengan baik agar tetap sehat</p> <p>6) Memantau perkembangan proyek CBS dan transformasi digital upaya bank untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing di era digital.</p> <p>7) Pentingnya penguatan tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko yang lebih menyeluruh</p> <p>8) Kerjasama dengan mitra eksternal harus diperluas namun tetap dilakukan secara selektif dan hati-hati, dengan evaluasi risiko yang komprehensif.</p> <p>9) Dalam hal pemeriksaan keuangan BPR, agar menggunakan KAP yang terdaftar di OJK.</p>

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a) Tugas, Tanggung jawab, Program kerja, dan Realisasi Program Kerja komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung jawab	-

	Program kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah rapat	-
2	Komite Pemantauan Risiko	
	Tugas dan Tanggung jawab	-
	Program kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah rapat	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung jawab	-
	Program kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah rapat	-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung jawab	-
	Program kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah rapat	-
5	Komite Kredit**)	
	Tugas dan Tanggung jawab	Meninjau, menilai dan memutuskan permohonan kredit untuk calon debitur serta menilai manajemen risiko dari kredit tersebut.
	Program kerja	Menciptakan kredit yang sehat sesuai dengan Tata kelola yang baik
	Realisasi	Setiap ada pengajuan kredit
	Jumlah rapat	Sepanjang tahun

Keterangan:

BPR Rifi Maligi dengan modal inti masih dibawah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) belum wajib memiliki komite lainnya.

b) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/tidak)
				Audit	Pemantauan risiko	Remunerasi & Nominasi	Manajemen risiko	lainnya	
1		Hendro Baskoro	Kadiv.Bisnis Umum	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Wakil ketua	Tidak
2		Nick Happy Nagata	Kadiv. Bisnis Kemitraan	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Wakil ketua	Tidak
3		Sutan Alam S	Tim Leader account officer (analisis)	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	anggota	Tidak
4		Candi Hasintongan Siregar	Account Officer	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	anggota	Tidak
5		Martha Veronica Lubis	Account Officer	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	anggota	Tidak
6		Syafiyati	PE Kepatuhan	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Pengamat	Tidak
7		Suriyanti	PE Manajemen Risiko	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Tidak menjabat	Pengamat	Tidak

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama anggota Direksi	Nominal	Persentase kepemilikan (%)	Nominal (Rp) tahun sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1		Bambang Prajitno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase kepemilikan (%)	Nominal (Rp) tahun sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun sebelumnya
1		Ricky Lukman	Rp 4.695.500.000,-	69.05%	Rp 300.000.000,-	13.04%
2		Ryan Prasetyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Pada tahun 2025, seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi telah menjalankan fungsinya secara profesional dan independen tanpa adanya kepentingan kepemilikan langsung terhadap BPR. Sementara itu, pada Dewan Komisaris, terdapat satu anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepemilikan saham dengan porsi mayoritas, yaitu sebesar 69,05%, yang menunjukkan adanya peran sebagai pemegang saham pengendali. Sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama anggota Direksi	Sandi bank lain*)/(**)	Nama Perusahaan lain	Persentase Kepemilikan (%)
1		Bambang Prajitno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama anggota Komisaris	Sandi bank lain*)/(**)	Nama Perusahaan lain	Persentase Kepemilikan (%)
1		Ricky Lukman		PT Interusaha Sukses Mandira	10%
				PT Intersukses Graha Mandiri	30%
				PT Graha Multi Cipta Sentosa	90%
				PT Rifi Graha Sentosa	90%
2		Ryan Prasetyo		PT Tanamas Indonesia Properti	3%
				PT Arjuna Trinity Investama	1%
				PT Arjuna Global Mining	17%
				PT Arjuna Global Artha	17%

Anggota Direksi Bank Rifi tidak memiliki saham pada perusahaan manapun, baik perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan maupun di luar sektor tersebut. Sementara itu, Anggota Dewan Komisaris Bank Rifi, selain memiliki saham pada Bank Rifi, juga tercatat memiliki saham pada perusahaan lain di luar Bank Rifi. Kepemilikan saham tersebut bersifat pribadi dan tidak mempengaruhi peran serta independensi yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional Bank Rifi.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Bambang Prajitno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Ricky Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2		Ryan Prasetyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Bank Rifi tidak memiliki hubungan keuangan satu dengan lainnya. Hal ini berarti tidak terdapat bantuan keuangan, pemberian pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, atau bentuk hubungan keuangan lainnya antar pihak-pihak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Bambang Prajitno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Ricky Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Jenny Tunggal Djaya – Ibu, Djaja Hendrawan – Adik ipar
2		Ryan Prasetyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Anggota Direksi Bank Rifi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Bank Rifi, sehingga independensi dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan dapat terjaga dengan baik.

Di sisi lain, terdapat hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Bank Rifi. Namun demikian, hubungan tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan maupun hak kepemilikan, serta tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Bank Rifi senantiasa memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara independen, objektif, transparan, serta bebas dari benturan kepentingan, melalui penerapan mekanisme pengendalian internal dan kebijakan pengungkapan (disclosure) yang memadai.

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	928.000.000,-	2	382.200.000,-
2	Tunjangan				
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya				
Total Remunerasi			928.000.000,-		382.000.000,-
Jenis Fasilitas lain					
1	Perumahan				
2	Transportasi	2	28.800.000,-		
3	Asuransi kesehatan	2	51.450.000,-		
4	Fasilitas lainnya				
Total Fasilitas lain			80.250.000,-		
Total Remunerasi dan Fasilitas lain			1.008.250.000,-		382.000.000,-

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Rifi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). penetapan remunerasi dan fasilitas dilakukan secara transparan, akuntabel, dan independen, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang Bank serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.01 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.65 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.92 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4.1 : 1

Bank Rifi senantiasa menjaga agar rasio gaji berada dalam batas yang wajar dan proporsional. Bank Rifi berkomitmen untuk menjaga agar rasio gaji tertinggi dan terendah tetap dalam batas yang wajar dan adil, sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan adil.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	15 April 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja BPR periode laporan Maret 2025; - Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris; - Pendapat, saran dan arahan Dewan Komisaris
2	16 Juli 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja BPR periode laporan Juni 2025; - Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris; - Pendapat, saran dan arahan Dewan Komisaris
3	10 Oktober 2025	2	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja BPR periode laporan September 2025;

			<ul style="list-style-type: none"> - Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris; - Pendapat, saran dan arahan Dewan Komisaris
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris Bank Rifi telah melaksanakan rapat secara rutin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal Bank Rifi terkait tata kelola perusahaan.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1		Ricky Lukman	3	0	100
2		Ryan Prasetyo	3	0	100

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris Bank Rifi telah melaksanakan rapat secara rutin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal Bank terkait tata kelola perusahaan.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud)

Jumlah Penyimpangan internal (dalam 1 tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah diselesaikan		nihil						
Dalam proses Penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

Selama tahun 2025 pada Bank Rifi tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud), baik dalam bentuk pelanggaran terhadap kebijakan internal, kebijakan eksternal, penyelewengan wewenang, penyalahgunaan aset, maupun bentuk ketidaksesuaian lainnya yang dapat merugikan perusahaan secara operasional maupun finansial.

L. Permasalahan hukum yang dihadapi

Permasalahan hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
total	-	1

Selama periode tahun 2025, terdapat permasalahan hukum pidana yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu debitur an. PT Alkantara (kerjasama BPR dengan Fintech Modalin d/h Igrow). BPR Rifi telah melakukan upaya penyelesaian hukum secara profesional dan bertanggung jawab. Seluruh proses hukum ditangani secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank Rifi juga telah menunjuk kuasa hukum profesional untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian hukum dilaksanakan secara optimal, dengan tetap menjaga reputasi dan kredibilitas Bank Rifi.

M. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki Benturan kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

Selama periode tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR Rifi Maligi.

N. Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (sosial/politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

Selama periode tahun 2025, Bank Rifi tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan kegiatan sosial dan kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR RIFI MALIGI
TAHUN 2025

Tangerang, 16 Maret 2026
Disetujui dan ditandatangani oleh


Bambang Prajitno
Direktur Utama


Ricky Lukman
Komisaris Utama

